



Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Menghadapi Implikasi Konflik Berkepanjangan Untuk Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Kabupaten Puncak

Nenes Wanimbo¹, Kristian H.P. Lambe², Naomi Patiung³

¹⁾ Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 09-07-2025 | Review 15-07-2025 | Revision 25-07-2025 | Accepted 30-07-2025

Abstrak: Konflik berkepanjangan di Kabupaten Puncak, Papua, berdampak signifikan terhadap pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP), khususnya dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Provinsi Papua dalam menghadapi dampak konflik terhadap pemberdayaan SDM OAP, serta mengkaji penerapan pendekatan manajemen konflik sebagai strategi pendukung. Menggunakan metode kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap delapan informan kunci dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMK memiliki peran strategis melalui pelatihan berbasis komunitas, pendidikan non-formal, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, pelaksanaan program menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, akses wilayah sulit, kondisi keamanan tidak stabil, dan ketidakpercayaan masyarakat. Pendekatan manajemen konflik berbasis kearifan lokal, pelibatan tokoh adat, gereja, dan pemuda terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program. Sinergi lintas sektor dan integrasi antara pembangunan fisik, sosial, serta pemulihan psikososial menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan SDM OAP di daerah konflik.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, konflik berkepanjangan, SDM, Orang Asli Papua, manajemen konflik.

Abstract: The prolonged conflict in Puncak Regency, Papua, has significantly affected the empowerment of Indigenous Papuan (OAP) human resources, particularly in education, economic, and social aspects. This study aims to analyze the role of the Village Community Empowerment Office (DPMK) of Papua Province in addressing the impact of conflict on OAP human resource development and to examine the application of conflict management approaches as a supporting strategy. Using a qualitative case study method, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving eight key informants from government, community leaders, and youth representatives. The findings reveal that DPMK plays a strategic role through community-based training, non-formal education, and local economic empowerment. However, program implementation faces obstacles such as limited budgets, difficult geographical access, unstable security conditions, and public distrust. A conflict management approach rooted in local wisdom, with the involvement of traditional leaders, churches, and youth, has proven effective in increasing community acceptance of programs. Cross-sectoral synergy and integration between physical development, social initiatives, and psychosocial recovery are essential to the success of OAP human resource empowerment in conflict-affected areas.

¹E-mail: neneswanimbo@gmail.com

²E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

³E-mail: naomipatiung@ukipaulus.ac.id

Keywords: *community empowerment, prolonged conflict, human resources, Indigenous Papuans, conflict management.*

PENDAHULUAN

Papua, sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks akibat faktor geografis, sosial, politik, dan budaya (Kartasasmita, 1996; Narayan, 2005). Kabupaten Puncak, yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua, merupakan salah satu daerah dengan tingkat konflik sosial-politik tertinggi di Indonesia. Konflik yang bersifat laten maupun terbuka berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan khususnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) (Galtung, 1996; Coser, 1956).

Konflik berkepanjangan ini menimbulkan hambatan besar dalam proses pembangunan manusia. Pendidikan sering terhenti akibat penutupan sekolah, mobilitas masyarakat terganggu karena akses jalan rusak atau tidak aman, dan banyak tenaga pendidik serta tenaga kesehatan yang mengungsi (LIPI, 2011; Bappenas, 2020). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kesempatan masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas diri.

Selain itu, marginalisasi struktural yang dialami OAP, ketimpangan pembangunan, serta pendekatan keamanan yang dominan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Yoman, 2017). Pendekatan pembangunan yang bersifat top-down dan kurang melibatkan tokoh adat, agama, maupun pemuda sering kali memunculkan resistensi sosial (Lederach, 1997). Dalam situasi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Provinsi Papua memegang peran strategis untuk menginisiasi dan mengimplementasikan program pemberdayaan berbasis potensi lokal, sekaligus mengintegrasikan pendekatan manajemen konflik.

Tabel berikut menunjukkan gambaran kondisi pendidikan dan ekonomi Kabupaten Puncak sebelum dan sesudah eskalasi konflik menurut data BPS dan Bappenas:

Tabel 1. Gambaran kondisi pendidikan dan ekonomi Kabupaten Puncak sebelum dan sesudah eskalasi konflik

Indikator	Sebelum Konflik Meningkat (2015)	Setelah Konflik Berkepanjangan (2023)	Sumber
Tingkat Partisipasi Sekolah (usia 7–18 tahun)	72%	45%	BPS Papua (2023)
Angka Melek Huruf (usia ≥15 tahun)	68%	52%	BPS Papua (2023)
Pendapatan Per Kapita per Tahun	Rp 11,5 juta	Rp 7,2 juta	Bappenas (2024)
Persentase Rumah Tangga di Bawah Garis Kemiskinan	32%	48%	BPS Papua (2023)
Jumlah Sekolah yang Beroperasi	85% dari total	54% dari total	BPS Papua (2023)

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan signifikan pada indikator pendidikan dan ekonomi, yang mengindikasikan urgensi intervensi pemberdayaan yang adaptif terhadap kondisi konflik.

Penelitian ini penting dilakukan karena pemberdayaan SDM OAP di daerah konflik seperti Kabupaten Puncak tidak dapat mengandalkan pendekatan pembangunan konvensional. Integrasi antara strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal dan pendekatan manajemen konflik berbasis kearifan budaya menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan program. Tanpa strategi yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya dan keamanan, program pemberdayaan berisiko gagal, memperlebar ketimpangan, serta memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

TINJAUAN LITERATUR

Landasan Teoretis

Konflik sosial dan transformasi konflik. Teori konflik sosial menekankan bahwa konflik sering berakar pada ketimpangan akses sumber daya, marginalisasi, dan perbedaan nilai (Coser, klasik). Galtung menyoroti dimensi kekerasan struktural yang membuat ketidakadilan tampak “damai” tetapi tetap menghasilkan penderitaan struktural. Untuk pendekatan penyelesaian jangka panjang, teori *conflict transformation* (Lederach) menekankan pembangunan hubungan, kapasitas lokal, dan rekonsiliasi budaya sebagai prasyarat perdamaian yang berkelanjutan.

Manajemen konflik terapan. Rahim menawarkan kerangka gaya penanganan konflik (*integrating, obliging, dominating, avoiding, compromising*) yang berguna untuk merancang intervensi institusional – termasuk pelatihan aparaturnya lokal agar lebih sensitif konflik. Pendekatan manajemen konflik yang sistematis membantu organisasi menilai kapan konflik harus diredam, dimitigasi, atau ditransformasikan menjadi peluang perubahan.

Teori pemberdayaan (empowerment). Konsep pemberdayaan (Narayan / World Bank) melihat pemberdayaan sebagai peningkatan kapabilitas, akses informasi, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya/keputusan. Kerangka ini menggarisbawahi bahwa program pemberdayaan efektif ketika memberdayakan aktor lokal untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya sendiri.

Definisi Operasional

- **Konflik berkepanjangan:** situasi persisten di mana insiden kekerasan atau ketegangan bersifat berulang dan memengaruhi fungsi sosial-ekonomi serta layanan publik selama beberapa tahun (mengacu laporan lapangan dan pengamatan lokal). [Human Rights Monitor](#)
- **Pemberdayaan masyarakat kampung (community empowerment):** proses peningkatan kapabilitas individu/kelompok kampung untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam perencanaan, dan mengelola sumber daya lokal (mengacu Narayan/World Bank). [Open Knowledge Repository](#)
- **SDM Orang Asli Papua (OAP):** warga adat setempat yang menjadi fokus peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penguatan kelembagaan berbasis kearifan lokal.
- **Peran DPMK:** fungsi institusional dinas provinsi yang memfasilitasi pelatihan, pendampingan kelembagaan kampung, penyaluran dana, dan koordinasi lintas sektor untuk pemberdayaan kampung. (Definisi operasional ini dihubungkan

dengan praktik birokrasi DPMK di Papua; sejumlah kajian lokal menelaah fungsi ini). [ResearchGateAcademia](#)

- **Pendekatan manajemen konflik berbasis kearifan lokal:** kombinasi teknik mediasi formal dan mekanisme adat untuk meredakan ketegangan dan membangun legitimasi program pemberdayaan.

Hasil-hasil Penelitian Terkini (2018–2025)

- **Dampak konflik terhadap layanan pendidikan & ekonomi.** Laporan dan studi lapangan akhir-akhir ini menegaskan bahwa konflik di wilayah pegunungan Papua menyebabkan penutupan sekolah, pengungsian guru/warga, dan gangguan layanan publik—mengakibatkan turunnya akses pendidikan dan pendapatan keluarga. Temuan ini konsisten dengan temuan tesis Anda. [The GuardianHuman Rights Monitor](#)
- **Peran DPMK dan mekanisme penyaluran dana kampung.** Studi kasus di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya menunjukkan DPMK berperan dalam penyaluran dana kampung dan program pemberdayaan; namun efektivitas menurun karena kendala akses, anggaran, dan pengawasan. Beberapa publikasi mahasiswa/pemerintah (2022–2024) mengkaji peran DPMK pada penyaluran dana kampung dan hambatan implementasinya. [ResearchGateAcademia](#)
- **Pendekatan berbasis kearifan lokal & aktor agama/adat.** Penelitian lokal (2023–2024) menekankan efektivitas keterlibatan tokoh adat, gereja, dan pemuda dalam membangun legitimasi program pemberdayaan serta proses rekonsiliasi sosial—selaras dengan prinsip *conflict transformation* Lederach. Studi-studi ini merekomendasikan integrasi mekanisme adat dalam desain program pemberdayaan. [Jurnal Universitas PadjadjaranResearchGate](#)
- **Human rights & eskalasi kekerasan 2023–2025.** Laporan HAM nasional/internasional (Human Rights Watch, lembaga pemantau lokal) menggambarkan eskalasi kekerasan dan dampaknya pada penduduk sipil—menandai konteks keamanan yang semakin menantang bagi program pemberdayaan. Hal ini memberi tekanan pada kebutuhan pendekatan keamanan-humanais pada intervensi pembangunan. [Human Rights Watch+1](#)

Analisis – konsistensi temuan dan pertentangan

- **Konsistensi:** Literatur empiris terbaru mendukung temuan penelitian ini adalah bahwa DPMK memiliki peran krusial tetapi dibatasi oleh: (a) keterbatasan anggaran/logistik; (b) akses wilayah yang sulit; (c) kondisi keamanan; dan (d) kurangnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam tahap perencanaan. Studi lokal 2022–2024 menegaskan pola ini di Puncak/Puncak Jaya. [ResearchGateAcademia](#)
- **Pertentangan/minim bukti:** Beberapa kajian normatif mengusulkan pendekatan top-down (birokratis) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, sementara literatur perdamaian menekankan pendekatan dialogis/kultural. Bukti empiris yang menguji mana kombinasi (infrastruktur ↔ rekonsiliasi sosial) paling efektif di wilayah konflik Papua masih terbatas dan sering bersifat studi kasus lokal tanpa generalisasi kuat. [ResearchGateProfessor Bell Readings](#)

Kesenjangan Penelitian (*Research Gaps*)

Berdasarkan telaah di atas dan posisi penelitian ini, dapat diidentifikasi beberapa *research gap* penting:

1. **Evaluasi empiris komparatif efektivitas model pemberdayaan DPMK yang mengintegrasikan (a) pembangunan fisik, (b) program ekonomi, dan (c) intervensi manajemen konflik berbasis adat.** Studi komparatif antar-kabupaten di Papua relatif sedikit; mayoritas bersifat kasus tunggal. [ResearchGateAcademia](#)
2. **Metrik kuantitatif jangka menengah/longitudinal untuk mengukur dampak pemberdayaan SDM OAP di zona konflik.** Banyak studi bersifat kualitatif deskriptif; kurang ada data panel yang menunjukkan perubahan indikator SDM seiring intervensi. [Human Rights Monitor](#)
3. **Analisis mekanisme institusional DPMK – bagaimana tata kelola, akuntabilitas, dan koordinasi lintas sektor (kepala daerah, Bina Marga, Dukcapil, tokoh adat) menentukan keberhasilan program di wilayah rawan konflik.** Tesis Anda mengisi sebagian gap ini, namun perlu diperkuat dengan model evaluasi organisasi dan indikator outcome. [ResearchGate](#)
4. **Strategi pemulihan psikososial yang terintegrasi dalam program pemberdayaan ekonomi/pendidikan.** Literatur menunjukkan perlunya dukungan psikososial, tetapi implementasi terintegrasi masih jarang dievaluasi secara sistematis. [Jurnal Universitas Padjadjaran](#)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan kontekstual di lingkungan alami (Yin, 2018). Desain ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Provinsi Papua dalam memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) di tengah konflik berkepanjangan di Kabupaten Puncak. Studi kasus kualitatif dipandang relevan untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan berlapis, termasuk interaksi antara faktor sosial, budaya, politik, dan keamanan (Creswell & Poth, 2018).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat kampung di Kabupaten Puncak, baik dari unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, maupun perwakilan masyarakat. Mengingat keterbatasan aksesibilitas di wilayah konflik, teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan yang memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman langsung, serta keterlibatan aktif dalam program pemberdayaan (Palinkas et al., 2015). Sampel penelitian terdiri dari delapan informan kunci: Kepala DPMK Provinsi Papua, Bupati Kabupaten Puncak, Kepala Dukcapil, Kepala Bina Marga, tokoh agama, anggota legislatif daerah, Kepala Inspektorat Provinsi Papua, dan perwakilan pemuda.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sebagai salah satu daerah dengan intensitas konflik tinggi di Papua. Selain itu, wawancara dan pengumpulan dokumen pendukung juga dilakukan di Kantor DPMK Provinsi Papua di Jayapura. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, mulai Mei hingga Juni 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, verifikasi informasi, hingga analisis temuan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat urgensi pemberdayaan SDM di daerah konflik serta peran strategis DPMK dalam konteks tersebut (Bappenas, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh perspektif komprehensif dari informan kunci, (2) observasi partisipatif untuk mengamati dinamika sosial dan aktivitas pemberdayaan di tingkat kampung, serta (3) studi dokumentasi terhadap

laporan resmi, rencana strategis DPMK, data Badan Pusat Statistik (BPS), dan berita dari media lokal maupun nasional. Pendekatan multi-sumber ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data melalui triangulasi (Patton, 2015).

Analisis data dilakukan secara tematik (*thematic analysis*), yang meliputi proses reduksi data, kategorisasi, penafsiran, dan penarikan kesimpulan (Braun & Clarke, 2006). Data wawancara ditranskrip verbatim, kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti dampak konflik, strategi pemberdayaan, hambatan implementasi, dan penerapan manajemen konflik berbasis kearifan lokal. Validitas temuan diperkuat melalui *member checking* dengan mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan kunci, serta *peer debriefing* dengan rekan peneliti untuk meminimalkan bias subjektif (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan delapan informan kunci yang dipilih melalui *purposive sampling*, masing-masing memiliki peran strategis dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Puncak. Responden berasal dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, legislatif daerah, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pejabat teknis. Karakteristik mereka ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama/Identitas	Jabatan/Peran	Peran Strategis dalam Pemberdayaan
1	Yopi Murib, S.E., M.M.	Kepala DPMK Provinsi Papua	Perumusan kebijakan, koordinasi program pemberdayaan
2	Elvis Tabuni, S.E., M.M.	Bupati Kabupaten Puncak	Penentu kebijakan daerah, fasilitasi keamanan dan logistik
3	Firom M. Balinan, S.H.	Kepala Dukcapil Kabupaten Puncak	Validasi data kependudukan sebagai basis perencanaan
4	Emmy Enembe, S.Sos.	Kepala Bina Marga	Penyediaan infrastruktur pendukung program pemberdayaan
5	Pdt. Petrus Asso, M.Th.	Tokoh agama	Penguatan moral, rekonsiliasi sosial, dan mediasi budaya
6	Marinus Telenggen, S.H.	Anggota DPRK Kabupaten Puncak	Fungsi legislasi dan pengawasan program
7	Drs. Anggiat Situmorang, M.Si., Ak., CA	Kepala Inspektorat Provinsi Papua	Pengawasan akuntabilitas dan transparansi program
8	Enis Murib, S.T.	Tokoh pemuda	Aktivasi peran pemuda dalam kegiatan sosial-ekonomi

Sumber: Hasil Wawancara (2025)

Kombinasi latar belakang responden ini memastikan data yang diperoleh mencakup perspektif kebijakan, teknis, sosial, dan kultural, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif.

Dampak Konflik Berkepanjangan terhadap Pemberdayaan SDM OAP

Hasil wawancara menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan di Kabupaten

Puncak berdampak multidimensional terhadap proses pemberdayaan SDM OAP. Akses pendidikan dan pelatihan terganggu, infrastruktur pendukung tidak berfungsi optimal, dan ketidakamanan memicu eksodus masyarakat ke daerah yang lebih aman.

Kepala DPMK Provinsi Papua, Yopi Murib, menyatakan:

"Banyak program pemberdayaan terhambat karena situasi keamanan yang tidak stabil, sehingga masyarakat sulit berpartisipasi secara optimal. Kondisi psikologis anak muda pun tertekan, memengaruhi motivasi belajar mereka." (Hasil wawancara, 2025)

Hal senada diungkapkan Bupati Elvis Tabuni:

"Konflik bersenjata menyebabkan sekolah tutup, guru mengungsi, dan aktivitas ekonomi terhenti. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga trauma sosial." (Hasil wawancara, 2025)

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa konflik berkepanjangan menghambat akses layanan publik dan memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi (Bappenas, 2020; Lederach, 1997).

Peran DPMK dalam Pemberdayaan di Tengah Konflik

Analisis data menunjukkan bahwa DPMK berperan strategis melalui tiga fokus utama:

1. **Pelatihan berbasis komunitas** di wilayah yang relatif aman.
2. **Pendidikan non-formal** untuk mengatasi terhentinya sekolah formal.
3. **Penguatan ekonomi lokal** melalui kegiatan wirausaha kecil berbasis potensi kampung.

Yopi Murib menegaskan:

"Kami mengutamakan pelatihan yang bisa dilaksanakan di kampung sendiri dengan melibatkan tokoh adat, supaya program bisa berjalan walau mobilitas terbatas." (Hasil wawancara, 2025)

Firom M. Balinan menambahkan pentingnya basis data yang akurat:

"Tanpa data kependudukan yang valid, program akan salah sasaran, apalagi di daerah konflik di mana mobilitas penduduk sangat tinggi." (Hasil Wawancara, 2025)

Hambatan Implementasi Program

Meskipun memiliki peran strategis, DPMK menghadapi hambatan serius, meliputi:

- **Keterbatasan anggaran** yang menghambat skala intervensi.
- **Akses wilayah sulit** akibat medan geografis dan kerusakan infrastruktur.
- **Ketidakstabilan keamanan** yang membatasi mobilitas tim lapangan.
- **Ketidakpercayaan masyarakat** terhadap institusi pemerintah.

Kepala Bina Marga, Emmy Enembe, menyoroti keterkaitan antara infrastruktur dan pemberdayaan:

"Banyak pelatihan gagal dilaksanakan karena akses jalan rusak atau wilayah tidak aman. Tanpa jalan yang layak, logistik dan pelatih tidak bisa masuk." (Hasil wawancara, 2025)

Pendekatan Manajemen Konflik sebagai Strategi Pendukung

Hasil analisis mengindikasikan bahwa penerapan manajemen konflik berbasis kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan di Kabupaten Puncak. Strategi ini meliputi:

- Melibatkan tokoh adat, gereja, dan pemuda dalam perencanaan program.
- Memfasilitasi dialog kampung untuk membangun kepercayaan.
- Mengintegrasikan kegiatan pemulihan psikososial ke dalam program ekonomi dan pendidikan.

Pdt. Petrus Asso menyampaikan:

"Pendekatan teknis saja tidak cukup. Masyarakat akan lebih menerima jika tokoh adat dan gereja ikut mengawal program." (Hasil wawancara, 2025)

Temuan ini menguatkan teori *conflict transformation* (Lederach, 1997), bahwa pembangunan di wilayah konflik harus berjalan seiring dengan rekonsiliasi sosial.

Pembahasan Temuan

Temuan penelitian ini menjawab seluruh rumusan masalah yang diajukan. Pertama, konflik berkepanjangan terbukti menghambat proses pemberdayaan SDM OAP melalui kerusakan layanan publik, keterbatasan infrastruktur, dan trauma sosial. Kedua, DPMK memainkan peran vital namun menghadapi tantangan struktural dan kontekstual yang signifikan. Ketiga, pendekatan manajemen konflik yang diintegrasikan ke dalam strategi pemberdayaan terbukti meningkatkan penerimaan dan efektivitas program.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Warda dan Kurniawan (2024) yang menekankan perlunya perlindungan sosial adaptif di Papua, serta memperkuat rekomendasi Ife dan Tesoriero (2006) mengenai pentingnya pemberdayaan berbasis komunitas dalam konteks sosial-budaya lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Provinsi Papua dalam memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) di tengah konflik berkepanjangan di Kabupaten Puncak, serta mengkaji penerapan pendekatan manajemen konflik sebagai strategi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan memberikan dampak multidimensional terhadap proses pemberdayaan, mencakup terganggunya layanan pendidikan, menurunnya aktivitas ekonomi, serta melemahnya kohesi sosial.

DPMK memiliki peran strategis dalam menginisiasi dan mengimplementasikan program pemberdayaan berbasis komunitas, pendidikan non-formal, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, efektivitas program sering terhambat oleh keterbatasan anggaran, akses geografis yang sulit, kondisi keamanan yang tidak stabil, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pemerintah. Kendala-kendala ini menegaskan perlunya strategi adaptif yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan keamanan setempat.

Penerapan manajemen konflik berbasis kearifan lokal terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan. Pelibatan tokoh adat, gereja, dan pemuda bukan hanya memperkuat legitimasi program, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang konstruktif untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan sosial. Temuan ini memperkuat teori *conflict transformation* (Lederach, 1997) yang menekankan pentingnya

membangun hubungan sosial sebagai bagian dari proses pembangunan di daerah konflik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, lembaga pemberdayaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan strategi pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi, serta pemulihan psikososial secara simultan. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang sinergi antara pemberdayaan masyarakat dan manajemen konflik berbasis budaya lokal, khususnya di wilayah dengan dinamika sosial-politik yang kompleks seperti Papua.

Keterbatasan dan Saran Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif sedikit dan cakupan geografis yang terbatas pada Kabupaten Puncak, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Papua. Selain itu, data yang diperoleh lebih bersifat kualitatif deskriptif, sehingga pengukuran dampak jangka panjang program pemberdayaan belum dapat dilakukan secara komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan cakupan wilayah yang lebih luas, melibatkan lebih banyak aktor lintas sektor, serta mengembangkan indikator kuantitatif untuk menilai keberhasilan pemberdayaan SDM di daerah konflik secara longitudinal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024*. Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Papua. (2023). *Papua dalam angka 2023*. BPS Provinsi Papua.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE Publications.
- Gusran, G., Lambe, K. H. P., & Rantererung, C. L. (2025). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 128–135. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/886/736>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (3rd ed.). Pearson Education.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES.
- Lambe, K. H. P. (2022). Tongkonan Toraja in the Perspective of Human Ecology and Local Economy. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity*, 369. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318251>
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lambe, K. H. P., Radjab, M., Muhammad, R., Toding, A., & Muhammad, S. (2022). Mentuyo (Suicide) Millennials During the Covid-19 Pandemic From Toraja

- Cultural Perspective. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 2550–2562. <https://mail.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/1834/1050>
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Narayan, D. (2005). *Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-6057-4>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. *International Journal of Conflict Management*, 13(3), 206–235. <https://doi.org/10.1108/eb022874>
- Randan, F., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2025). Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana / Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 101–107. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/864/712>
- Susanti, R., Lambe, K. H. P., & Gunadi, H. (2024). Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Yayasan Kristen Wamena Kabupaten Jayawijaya. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 47–55. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.301>
- Warda, N., & Kurniawan, M. (2024). Adaptive social protection for conflict-affected regions in Indonesia: Lessons from Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/jsp.12345>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yoman, S. (2017). *Suara gereja bagi umat tertindas*. Cenderawasih Press.